



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh
PASAL 23, PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA
KLIEN KJA XYZ**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:
Muhammad Rafli Bintang Pratama/2204431004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh
PASAL 23, PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA
KLIEN KJA XYZ**



Disusun oleh:

Muhammad Rafli Bintang Pratama/2204431004

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Muhammad Rafli Bintang Pratama
NIM : 2204431004
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Depok, 29 Mei 2026

Mahasiswa,



Muhammad Rafli Bintang Pratama

NIM. 2204431004

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

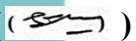
Nama : Muhammad Rafli Bintang Pratama
NIM : 22004431004
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :

**“ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh PASAL 23,
PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA KLIEN KJA XYZ”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyatan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Birrul Walidain, M.Akt. ()

Anggota Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : / /

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.
NIP. 197009131999031002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Rafli Bintang Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 22004431004
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :
**“ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh PASAL 23,
PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA KLIEN KJA XYZ”**

Disetujui Oleh Pembimbing:

Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak.
NIP. 198106122023212035

Diketahui Oleh

Kepala Program Studi

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., CPIA.
NIP. 196901111998022001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rafli Bintang Pratama
NIM : 2204431004
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh PASAL 23,
PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA KLIEN KJA XYZ”**

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Mei 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Rafli Bintang Pratama
NIM. 2204431004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi Terapan yang berjudul Analisis Kepatuhan Perpajakan Unifikasi PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 Pada Klien KJA XYZ ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi Terapan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir yang ada di semester delapan. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta;
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta;
4. Ibu Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses skripsi;
5. Bapak Birrul Walidain, M.Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan arahannya selama proses skripsi;
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan;
7. Bapak Direktur KJA XYZ beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian skripsi;
8. Bapak dan Ibu Manajer KJA XYZ yang telah mengawasi dan memberi arahan selama proses pengambilan data skripsi;
9. Ibu Manajer HR&GA yang telah membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini;
10. SPV dan Senior KJA XYZ sebagai penanggung jawab perpajakan PT A dan PT B yang telah memberikan banyak informasi dan pengalaman serta ilmunya selama proses pengambilan data skripsi;
11. Orang tua dan Adik yang telah memberikan dukungan moral dan material selama melaksanakan skripsi;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

12. Nurul, Sapri, Royyan, dan Syifa yang telah memberikan semangat selama proses perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta;
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



Depok, 29 Mei 2026

(Muhammad Rafli Bintang Pratama)

NIM. 2204431004



ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN UNIFIKASI PPh PASAL 23, PPh PASAL 26, DAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA KLIEN KJA XYZ

Oleh

Muhammad Rafli Bintang Pratama

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan perpajakan unifikasi PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada klien Wajib Pajak badan yang ditangani oleh Kantor Jasa Akuntansi (KJA) XYZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada dua subjek badan yaitu, PT A dan PT B. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan SPV dan Senior KJA XYZ, serta data sekunder berupa dokumentasi SPT Masa PPh Unifikasi, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan unifikasi sangat bergantung pada perilaku SDM dan struktur internal entitas. PT A menunjukkan kepatuhan perpajakan yang tinggi dan otonom serta berhasil mengoptimalkan tarif P3B melalui digitalisasi formulir DGT. Sebaliknya PT B, mengalami keterlambatan administratif akibat sistem pencatatan berbasis kas dan fenomena *agentive state*, dimana staf internal menggeser tanggung jawab moral serta beban kerja verifikasi sepenuhnya kepada konsultan. Guna memitigasi risiko ketidakpatuhan tersebut, KJA XYZ bertindak sebagai pengaman melalui prosedur *review expense* secara menyeluruh. Kesimpulannya, keberhasilan kepatuhan perpajakan unifikasi yang modern membutuhkan sinergi antara kompetensi dan otonomi moral dalam entitas.

Kata Kunci: *Agentive State*, Perilaku Kepatuhan, PPh Unifikasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE ON THE UNIFIED WITHHOLDING TAX
ARTICLES 23, ARTICLES 26, AND ARTICLES 4(2)
AMONG CLIENTS OF KJA XYZ**

By

Muhammad Rafli Bintang Pratama

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze tax compliance regarding the consolidation of Income Tax Article 23, 26, and 4(2) among corporate clients served by Accounting Services Firm (KJA) XYZ. Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, this research examines two corporate subjects, PT A and PT B. Data comprise primary sources from interviews with KJA XYZ's supervisor and senior accountant, alongside secondary data including Unified Income Tax returns and revenue receipts. Data collection involved semi-structured interviews and triangulation. Results indicate that unified tax compliance levels highly depend on human resource behavior and internal structures. PT A demonstrated high, autonomous compliance, successfully optimizing tax treaty rates through DGT form digitization. Conversely, PT B faced administrative delays due to a cash-based recording system and an agentic state phenomenon, where internal staff shifted verification workloads entirely to consultants. To mitigate these risks, KJA XYZ acts as a safeguard through comprehensive expense reviews. In conclusion, successful modern unified tax compliance requires synergy between digital competence and moral autonomy within the entity.

Keywords: *Agentic State, Compliance Behavior, Unified Income Tax*



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	6
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 26.....	7
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	9
2.1.4 Perpajakan Unifikasi	11
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB 3 METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Objek Penelitian	16
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	16
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	17
3.5 Metode Analisis Data	18
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1	Hasil Penelitian.....	21
4.1.1	Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	21
4.1.2	Penerapan PPh Unifikasi pada PT A dan PT B.....	26
4.2	Pembahasan	40
4.2.1	Analisis Perbandingan Proses	40
4.2.2	Analisis Faktor Ketidakpatuhan.....	42
4.2.3	Strategi Mitigasi Risiko oleh KJA XYZ	44
BAB 5	PENUTUP	47
5.1	Simpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR	PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....		51





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	10
Tabel 4.1 Perhitungan PPh 23 oleh KJA XYZ terhadap PT A	27
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 23 oleh KJA XYZ terhadap PT A	28
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 26 oleh KJA XYZ terhadap PT A	30
Tabel 4.4 Perhitungan PPh 4 ayat 2 oleh KJA XYZ terhadap PT A	34
Tabel 4.5 Perhitungan PPh 4 ayat 2 oleh KJA XYZ terhadap PT B.....	35
Tabel 4.6 Penyetoran PPh Unifikasi oleh PT A	36
Tabel 4.7 Penyetoran PPh Unifikasi oleh PT B	37
Tabel 4.8 Pelaporan PPh Unifikasi oleh KJA XYZ untuk PT A	38
Tabel 4.9 Pelaporan PPh Unifikasi oleh KJA XYZ untuk PT B	39
Tabel 4.10 Matriks Perbandingan Proses dan Kendala PT A dan PT B	42
Tabel 4.11 Strategi KJA XYZ dalam memitigasi risiko PT A dan PT B	46





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Treaty Tax</i> Indonesia-Thailand	9
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	15
Gambar 4.1 Proses Perpajakan Unifikasi oleh KJA XYZ terhadap PT A	24
Gambar 4.2 Proses Perpajakan Unifikasi oleh KJA XYZ terhadap PT B	26
Gambar 4.3 Bagan Analisis Faktor Ketidakpatuhan.....	43





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu	52
Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara	59
Lampiran 3 SPT Masa Unifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik PT A	80
Lampiran 4 SPT Masa Unifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik PT B	81
Lampiran 5 Lembar Bimbingan	82



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan fiskal khususnya di bidang perpajakan, terus mengalami perkembangan untuk peningkatan penerimaan negara dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 yang dirinci dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2025 mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 menjelaskan target penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.189,3 triliun (Imantoro, 2025). Penerimaan pajak berdasarkan artikel yang dirilis oleh (Kementerian Keuangan RI, 2026) yang juga sejalan dengan artikel yang dirilis oleh (IKPI, 2026) menjelaskan bahwa penerimaan pajak tahun 2025 dibawah realisasi dengan nominal Rp 1.917,6 triliun dengan persentase 87,6 persen dari target APBN. Kondisi ini terlihat adanya penurunan penerimaan pajak jika dilihat dari data yang dirilis dalam Laporan Kinerja oleh (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.988,3 triliun dengan persentase 103,5%. Kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai mencerminkan adanya hambatan dalam sisi penyerapan kebijakan serta dinamika tanggapan Wajib Pajak. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas kebijakan dan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi dan mematuhi seluruh tanggung jawab dan menjalankan hak-hak perpajakan (Ilma'nun, 2023). Salah satu permasalahan dalam berbagai literatur adalah tingginya biaya kepatuhan akibat kompleksitas sistem perpajakan nasional. Penelitian yang dilakukan pada PT Taiba Consulting mengungkapkan ketidakpatuhan dalam PPh Pasal 23 bersumber dari faktor eksternal perusahaan, seperti penundaan dari *vendor* (Hakim, Hidayat., 2023). Penelitian juga dilakukan oleh (Adityaningrum & Fatimah, 2024) menunjukkan adanya sistem digital E-Bupot Unifikasi tidak serta merta membuat perusahaan luput dari risiko keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pajak. Tantangan yang ada pada E-Bupot Unifikasi dalam penelitian (Intan & Wardani, 2024) ditemukan seringkali sistem yang *down*. Hal ini



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengindikasikan bahwa E-Bupot Unifikasi masih mengalami kendala dari sisi penerapannya.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan kebijakan sistem pemotongan pajak penghasilan secara unifikasi yang tertuang dalam peraturan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah diperbarui dengan regulasi terbaru PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Guna mendukung implementasi regulasi tersebut, pemerintah menyediakan sarana administratif E-Bupot Unifikasi. Transformasi digital ini terus dikembangkan hingga mencapai bentuk yang lebih komprehensif melalui integrasi dengan Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini hadir sebagai platform yang menggabungkan seluruh proses administrasi perpajakan (Gunawan, Fitria, Fibriyadi 2025).

Implementasi Coretax ini pada praktiknya menghadapi banyak tantangan. Penelitian yang dilakukan pada PT XYZ mengungkapkan bahwa walaupun telah diterapkannya E-Bupot Unifikasi, perusahaan masih mengalami keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Adityaningrum & Fatimah, 2024). Hal serupa ditemukan pada PT ABC yang mengidentifikasi adanya kendala teknis operasional dalam proses pelaporannya (Rahma & Ekowati, 2025). Berbagai kendala temuan ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan masih disertai adanya dengan hambatan dan kesenjangan dalam implementasi.

Fenomena hambatan ini terkonfirmasi melalui pengamatan awal di KJA XYZ, dengan ditemukannya satu kasus klien yang mengalami keterlambatan dalam penyeteroran pajak pada satu masa pajak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Wajib Pajak telah menggunakan jasa profesional dari Kantor Jasa Akuntansi dan memanfaatkan sistem unifikasi, risiko ketidakpatuhan administratif



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tetap dapat terjadi. Kejadian ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk menggali lebih dalam faktor penyebab keterlambatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat suatu gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada analisis satu atau dua jenis pemotongan pajak secara terpisah. Analisis pada pemotongan pajak yang kompleks seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam satu penelitian masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian mengambil perspektif dari suatu entitas perusahaan tunggal. Padahal, suatu sudut pandang dari klien Kantor Jasa Akuntansi yang mewakili beragam entitas bisnis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sistem unifikasi.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis tingkat kepatuhan untuk ketiga jenis pajak tersebut. Penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Perpajakan Unifikasi PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada klien KJA XYZ” dengan mengukur kepatuhan, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung, serta menilai efektivitas kebijakan unifikasi dilihat dari perspektif Wajib Pajak Badan yang dibantu oleh profesional perpajakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun secara akademis.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

PT A dan PT B, sebagai klien dari Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ, menghadapi kendala dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan unifikasi. Meskipun pelaporan pajak kedua entitas tersebut diselesaikan secara akurat dan tepat waktu, proses untuk mencapai kepatuhan ini masih dihadapi oleh berbagai hambatan operasional. Berdasarkan observasi pendahuluan, PT A yang memiliki kegiatan jasa konsultasi bisnis mengalami kesulitan administratif terkait pemenuhan kelengkapan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, sementara PT B yang memiliki kegiatan riset pasar menghadapi kendala prosedural dalam tahap penyetoran pajak ke kas negara. Menghadapi dinamika tersebut, KJA XYZ berperan sebagai profesional yang memfasilitasi dan memastikan kepatuhan perpajakan kliennya tetap terjaga. Mengingat perspektif teknis serta pengalaman praktis KJA dalam menangani



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

implementasi regulasi unifikasi masih jarang dieksplorasi secara akademis, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas peran dan proses KJA XYZ dalam memfasilitasi kliennya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan proses dan kendala dalam pemenuhan kewajiban PPh Unifikasi (PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2) antara PT A dan PT B yang difasilitasi oleh KJA XYZ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepatuhan formal, terutama mengenai keterlambatan pembayaran pada PT B, dibandingkan dengan PT A?
3. Bagaimana peran dan strategi KJA XYZ dalam memitigasi risiko sanksi denda akibat kendala administratif yang dihadapi oleh PT A dan PT B?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian yang didapat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan proses dan kendala dalam pemenuhan kewajiban PPh Unifikasi (PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2) antara PT A dan PT B yang difasilitasi oleh KJA XYZ.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat kepatuhan formal, terutama mengenai keterlambatan pembayaran pada PT B, dibandingkan dengan PT A.
3. Untuk merumuskan peran dan strategi KJA XYZ dalam memitigasi risiko sanksi denda akibat kendala administratif yang dihadapi oleh PT A dan PT B.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi pembaca dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait kepatuhan perpajakan unifikasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi KJA terkait mengoptimalkan proses kerja dan aparat perpajakan terkait sosialisasi perpajakan unifikasi.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan berisi struktur yang mempermudah dalam memberikan gambaran pembahasan penelitian secara singkat dan jelas yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjabarkan faktor pemicu permasalahan penelitian yang kemudian disusun dalam rumusan masalah. Untuk melengkapi penjelasan penelitian ini secara singkat dan jelas dijabarkan pula pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penjabaran teori yang relevan dengan isi penelitian dan digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode yang digunakan penelitian dalam melaksanakan penelitian. Pada metodologi dijabarkan pula mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode dalam pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dan metode analisis yang dilakukan.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan pembahasan hasil kajian atas masalah penelitian yang sudah disusun. Pada bab ini menjabarkan proses penelitian dan alur yang dirancang pada metode penelitian. Bab ini merupakan bagian utama yang berisi inti hasil penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PPh Unifikasi pada klien KJA XYZ tidak hanya karena kecanggihan dari sistem PPh Unifikasi yang terbaru melalui *Coretax*, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur internal dan pola perilaku entitas. Fenomena yang ditemukan pada PT A dan PT B menyajikan perbedaan yang mencolok. Kepatuhan perpajakan pada PT A sudah berubah menjadi sistem yang lebih mandiri dan otonom. Hal ini dibuktikan dengan ketelitian PT A dalam mengelola transaksi internasional yang memiliki tarif yang variatif karena adanya penerapan tarif P3B. Efisiensi ini ada karena PT A memandang pajak sebagai tanggung jawab entitas yang melekat, sehingga hubungan PT A dan KJA XYZ berjalan sebagai kemitraan profesional yang bersifat strategis.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi pada PT B. Kendala seperti keterlambatan data akibat penggunaan metode cash basis hanyalah masalah yang ditemukan di permukaan. Akar masalahnya adalah fenomena pergeseran tanggung jawab atau *Agentic State*. Dalam teori Milgram, staf PT B cenderung memposisikan diri hanya sebagai instrumen pelaksana yang melepaskan beban tanggung jawab kepatuhannya kepada KJA XYZ. Dampaknya menimbulkan ketergantungan yang kurang sehat mengingat tugas verifikasi yang seharusnya dilakukan secara internal justru berpindah menjadi beban kerja konsultan. Tidak adanya rasa kepemilikan atas kewajiban perpajakan ini menyebabkan instruksi sering kali terabaikan, dan respon aktif dari staf biasanya baru muncul jika ada tekanan langsung.

Sebagai respons atas perbedaan perilaku tersebut, KJA XYZ menjalankan peran mitigasi risiko yang adaptif. KJA XYZ tidak hanya berfungsi sebagai pengolah laporan, tetapi juga sebagai pengaman yang melindungi klien dari risiko sanksi administrasi melalui prosedur *review expense*, terutama bagi klien dengan profil risiko tinggi seperti PT B. Di saat yang sama, KJA XYZ bertindak sebagai verifikator bagi PT A guna memastikan penerapan peraturan P3B tetap akurat. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PPh Unifikasi sangat bergantung pada sinergi antara kompetensi SDM dan otonomi tanggung jawab



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

moral dalam entitas. Sehingga dalam hal ini peran KJA sangat penting untuk menutup celah kepatuhan yang ditimbulkan oleh perilaku internal dari kliennya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengemukakan saran praktis yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi PT A

Mengingat PT A telah memiliki kepatuhan yang tinggi. Disarankan untuk melakukan *review* berkala terhadap masa berlaku SKD *vendor* luar negeri. Langkah ini sebagai bentuk mitigasi agar tidak terjadi kegagalan validasi otomatis pada sistem akibat dokumen yang kadaluwarsa.

b. Bagi PT B

Saran untuk PT B yaitu dengan melakukan perubahan basis akuntansi yang semula *cash basis* menjadi *accrual basis*. Hal ini menjadi penting untuk pengakuan biaya yang menjadi objek PPh Unifikasi dapat dideteksi lebih awal, sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir masa pajak yang memicu keterlambatan. PT B juga disarankan untuk memberikan pelatihan khusus perpajakan bagi PIC nya agar muncul rasa tanggung jawab mandiri (otonom) dalam memverifikasi data sebelum dikirim ke konsultan guna mengurangi ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal.

c. Bagi KJA XYZ

KJA XYZ disarankan untuk menyusun standar prosedur komunikasi yang lebih terstruktur bagi klien dengan profil risiko tinggi. Penggunaan mekanisme *reminder* seminggu sebelum masa tenggat waktu administrasi perpajakan dapat memitigasi risiko *rush hour*.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat menjadi ruang pengembangan bagi penelitian dimasa mendatang. Oleh karenanya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan sampel perusahaan yang lebih banyak untuk menguji apakah faktor-faktor perilaku yang ditemukan di penelitian ini memiliki pengaruh signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Legislation 18/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/18-pmk-03-2021>
- Adityaningrum, K., & Fatimah, H. (2024, November 6). *Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ*. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/3180>
- Andrianus, W., Sandra, A., Esra, M. A., & Dasawaty, E. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 8. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/remik/article/view/14188/2882>
- BPMPP UMA. (2023, November 23). Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya. <https://bpmpp.uma.ac.id/2023/11/23/objek-penelitian-pengertian-macam-prinsip-dan-cara-menentukannya/>
- Citriadin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Lubna, Ed.). Sanabil.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, Januari 1). *Tax Treaty Thailand*. <https://www.pajak.go.id/id/p3b/mli-thailand>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>
- Gunawan, E., Fitria, N. P., & Fibriyadi, I. (2025). Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Unifikasi Dengan Sistem Coretax Pada PT XYZ. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(1), 116–126. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v10i1.1647>
- Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia. *Owner*, 7(2), 999–1008. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1382>
- IKPI. (2026, Januari 11). Penerimaan Pajak 2025 Tekor 271 Triliun, Target 2026 Dinilai Perlu Strategi Lebih Presisi. *IKatan Konsultan Pajak Indonesia*. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-2025-tekor-rp-271-triliun-target-2026-dinilai-perlu-strategi-lebih-presisi/>
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Imantoro, L. W. (2025, Januari 14). Realistiskah Target Penerimaan Pajak 2025? *Pratama Indo Mitra*. <https://pratamaindomitra.co.id/realistiskah-target-penerimaan-pajak-2025>
- Intan, R., & Wardani, N. M. S. (2024). Analisis Kepatuhan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT AJC. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 5. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/2946>
- Jenny, Exelium, M. R., & Darmawati, D. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Kesadaran Pajak, dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Islamic Economics & Financial Journal*, 5, 193–209. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v5i1.539>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tapaktuan. (2025, Januari 7). *Pajak Penghasilan* 4 ayat 2. <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/unduh/format-dan-blangko/315-layanan/2977-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2.html>
- Kementerian Keuangan RI. (2026, Februari 5). *Menkeu Purbaya Paparkan Kinerja Penerimaan Negara 2025, Pajak Berbalik Pulih di Semester II*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-2025>
- Khairunnisa, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh E-Filing, E-SPT Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Muhajirin, Risnita, & Asrula. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903>
- PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Legislation PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak (2025). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-11pj2025>
- Rahma, S. N., & Ekowati, D. L. (2025). *Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC*. 6. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/5352>
- Savitri, A. N., & Agha, R. Z. (2025). Analisis Peran E-Bupot Unifikasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Atas Pph Pasal 23 Di PT XYZ. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 6. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/5639>
- Sekaran, & Bougie. (2016). *Research Methods for Business* (7 ed.). JohnWiley&SonsLtd.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sumarsan, T., & Chyntia. (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (A. O. Septiyana, Ed.). CV.Campustaka.
- Suprayitno, D., Ahmad, Tartila, Sa'dianoor, & Alddin, Y. A. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif dan Referensi Wajib bagi Peneliti* (Pertama).
- Taufikurrahman. (2024). *Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)*. Politeknik Negeri Jakarta. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19734>



LAMPIRAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
1.	(Rahma & Ekowati, 2025)	Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi pada PT ABC	Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen	Menggunakan dua jenis pajak unifikasi yang sama yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT ABC sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26, Penelitian sebelumnya juga

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
2.	(Taufikurrahman, 2024)	Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ)	Politeknik Negeri Jakarta	Menggunakan dua jenis pajak yang sama yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT ABC sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26.

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
3.	(Hakim dkk., 2023)	Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia	Owner Riset & Jurnal Akuntansi	Menggunakan dua jenis pajak unifikasi yang sama yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Final (PPh Pasal 4 ayat 2)	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT Taiba Consulting sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
4.	(Adityaningrum & Fatimah, 2024)	Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ	Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen	Menggunakan salah satu jenis pajak yang sama yaitu PPh Pasal 23	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT XYZ sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
5.	(Gunawan dkk., 2025)	Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Unifikasi dengan Sistem Coretax pada PT XYZ	Jurnal Lentera Akuntansi	Menggunakan salah satu jenis pajak yang sama yaitu PPh Pasal 23	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT XYZ sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
6.	(Savitri & Agha, 2025)	Analisis Peran E-Bupot Unifikasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Atas Pph Pasal 23 Di PT XYZ	Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen	Menggunakan salah satu jenis pajak yang sama yaitu PPh Pasal 23	Melakukan penelitian di tempat yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT XYZ sedangkan penelitian nantinya akan dilakukan di KJA XYZ. Penelitian ini nantinya juga akan menambahkan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu - Sambungan

No	Nama Pengarang	Judul Artikel	Sumber Artikel	Persamaan	Perbedaan
7.	(Khairunnisa & Haq, 2023)	Pengaruh E-Filling, E-SPT dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta	Jurnal Ekonomi Trisakti	Menggunakan pajak unifikasi	Menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini nantinya menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada KJA XYZ

Sumber: Data diolah (2026)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22//04/2026	
1	Proses & Profil Implementasi	Sejak kapan PT A dan PT B menggunakan layanan KJA XYZ untuk PPh Unifikasi?	Sudah hampir lebih dari 10 tahun.	Sudah lama sekitar 10 tahun.	PT A telah menjalin kerjasama dengan KJA XYZ lebih dari 10 tahun.	PT B mulai menggunakan KJA XYZ pada April 2025.	KJA XYZ sudah menangani PT B dari April 2025.	PT B menggunakan jasa dari KJA XYZ sejak bulan April tahun 2025.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
1	Proses & Profil Implementasi (Lanjutan)	Bagaimana alur koordinasi pengiriman data pajak dari staf internal perusahaan kepada KJA XYZ?	Data dikirim bertahap selama mingguan oleh staf PT A yang menangani perpajakan untuk langsung dicicil <i>Tax compliance</i> nya oleh KJA XYZ.	Data dikirim biasanya akhir bulan untuk administrasi pajak bulan berikutnya.	Data dikirim di akhir bulan untuk administrasi pajaknya. Idealnya dikirim setiap minggunya bila berdasarkan <i>schedule</i> setiap bulannya. Namun hal ini tidak mengganggu efektivitas administrasi perpajakan PT A.	Proses awal dimulai dengan KJA XYZ <i>me-review expense</i> berdasarkan data mingguan PT B sebelum dilakukan, mencakup unsur pajak yang dipotong dan nominal pembayaran.	Terdapat <i>link sharing google drive</i> , lalu KJA XYZ akan melakukan pengecekan terkait kekurangan dokumen dan meminta konfirmasi dari rincian <i>invoice</i> .	Proses awal dimulai dengan <i>review expense</i> melalui <i>sharing Google Drive</i> sebelum PT B melakukan pembayaran, guna memastikan unsur perpajakan yang dipotong dan nominalnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara – Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
1	Proses & Profil Implementasi (Lanjutan)	Siapa saja pihak yang memiliki otoritas untuk menyetujui draf SPT Unifikasi sebelum dilaporkan?	Pembuatan <i>draft</i> dilakukan oleh staf dan senior staf, sebelum dikirimkan kepada PT A akan dicek oleh SPV.	Draft SPT Disetujui oleh SPV.	Pembuatan <i>draft</i> dilakukan oleh staf dan senior staf, sebelum dikirimkan kepada PT A akan dicek oleh SPV untuk disetujui dilapor.	Staf mengerjakan SPT, kirim ke senior untuk di cek, dan dikirim ke SPV untuk di konfirmasi sebelum dikirim ke klien.	Pihak yang menyetujui SPT Unifikasi merupakan SPV.	Staf mengerjakan SPT tersebut, kemudian akan di cek oleh senior dan akan mengirim ke SPV dan diberikan konfirmasi untuk bisa dilakukan pelaporan SPT.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Per-tanyaan Wa-wancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
2	Otoritas & Kepatuhan	Apakah Anda merasa staf PT A dan PT B memandang instruksi teknis dari KJA XYZ sebagai perintah yang wajib dilaksanakan?	Tidak Wajib karena sebatas <i>advise</i> , mereka selalu mempertanyakan bila hal ini dilakukan atau tidaknya sehingga dinilai cukup kritis.	Tidak wajib mengingat kita memberikan <i>advise</i> , namun banyak <i>advise</i> dari kita digunakan oleh mereka.	Tidak wajib karena sebatas <i>advise</i> , mereka selalu mempertanyakan bila hal ini dilakukan atau tidaknya sehingga dinilai cukup kritis. Namun banyak <i>advise</i> dari KJA digunakan oleh PT A.	KJA XYZ tidak bisa berpendapat untuk 100% wajib untuk diikuti, hanya sebatas saran.	Saran dari KJA XYZ seringnya digunakan oleh PT B seperti pem-berlakuan <i>gross up</i> .	Pada dasarnya klien tidak wajib untuk mengikuti 100% pernyataan dari KJA karena KJA XYZ hanya memberikan saran, namun pada PT B seringnya menggunakan saran dari KJA XYZ seperti pem-berlakuan <i>gross up</i> .

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
2	Otoritas & Ke-patuhan (Lanjut)	Bagai-mana respon staf perusahaan jika KJA XYZ memberi-kan teguran terkait ke-terlambatan data?	PT A tidak pernah telat kirim data.	Tidak pernah terjadi ke-terlambatan data.	PT A tidak pernah terlambat dalam mengirim data.	Respon yang diberikan oleh PT B dengan meminta maaf lalu mengirim-kan kembali konfirma-si ataupun data yang diminta oleh KJA XYZ.	Respon dari PT B yaitu minta maaf lalu mengirim-kan data seringnya malam hari di hari yang sama.	PT B dalam merespon teguran dari KJA XYZ atas data yang terlambat dengan mengucap-kan permintaan maaf dan data tersebut dikirim pada hari yang sama namun terkadang dikirim pada malam hari.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
2	Otoritas & Ke-patuhan (Lanjut)	Bagai-mana pengaruh pemberian instruksi secara jarak jauh terhadap ke-disiplinan klien dalam mengirim-kan data <i>softcopy</i> tepat waktu?	Pengiriman dokumen <i>softcopy</i> dari PT A sangat disiplin dalam waktu, dan dokumen yang diberikan cukup rapi.	Pengiriman dokumen sangat tepat waktu.	Pengiriman dokumen <i>softcopy</i> dari PT A sangat disiplin dalam waktu, dan dokumen yang diberikan cukup rapi.	Instruksi yang diberikan oleh KJA XYZ sudah tepat waktu namun PT B memang sedikit lambat dalam merespon instruksi tersebut dikarenakan <i>PIC</i> dari PT B memiliki <i>double job</i> .	Instruksi yang diberikan oleh KJA XYZ sudah tepat waktu namun PT B tidak terlalu cepat dalam merespon, bergantung pada kesibukan utama dari <i>PIC</i> PT B yang memang memiliki pekerjaan dalam promosi.	Instruksi yang diberikan oleh KJA XYZ sudah tepat waktu namun respon balik yang diberikan oleh PT B masih menunggu waktu yang cukup lama mengingat <i>PIC</i> dari PT B ini <i>double job</i> pada kesibukan promosi.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
3	Faktor Kendala & Perilaku	Apa kendala teknis yang sering menghambat implementasi PPh Unifikasi?	Karena cukup kritis dan tidak mudah meng-aplikasikan sesuatu secara cepat, karena membutuhkan diskusi internal.	Tidak ada kendala jika dari PPh Unifikasi nya.	Tidak ada kendala jika dari PPh Unifikasi nya, namun karena cukup kritisnya PT A sehingga tidak mudah meng-aplikasikan sesuatu secara cepat, karena membutuhkan diskusi internal.	Kalau dari dokumen tidak ada dikarenakan PPh Unifikasi itu terlapor pada tanggal 20 sedang-kan laporan keuangan mereka itu 3 hari kerja. Sehingga angka pasti pajak sudah di tanggal tersebut.	Dalam sistemnya terjadi eror namun bisa teratasi, hal lainnya PT B sering telat kirim NPWP/ NIK sehingga dalam melakukan <i>Import Draft</i> BPPU, KJA XYZ melakukan-nya dengan NPWP sementara.	Kendala dalam dokumen hampir sepenuhnya tidak ada, namun bila PT B terjadi terlambat pengiriman NIK, <i>Draft</i> BPPU akan menggunak-an NPWP sementara.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Ke-simpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
3	Faktor Kendala & Perilaku (Lanjut)	Apakah pernah terjadi keterlambatan karena alur birokrasi internal perusahaan di perusahaan klien yang lambat?	Kalau alur birokrasi sejauh ini ga pernah yang menyebabkan keterlambatan data.	Alur birokrasi yang ada tidak memengaruhi keterlambatan data.	Alur birokrasi yang ada tidak memengaruhi keterlambatan data.	Hal ini tidak pernah terjadi namun <i>PIC</i> klien yang memiliki <i>job</i> lain sehingga terkadang memperlambat proses kerja KJA XYZ.	Selama ini tidak pernah, namun kembali ke poin sebelumnya, <i>PIC</i> dari PT B ini <i>double job</i> .	Tidak pernah terjadi keterlambatan dari birokrasi internal klien namun keterlambatan terjadi karena <i>PIC</i> dari PT B memiliki <i>job</i> ganda.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
3	Faktor Kendala & Perilaku (Lanjut)	Apakah staf klien merasa bahwa tanggung jawab kesalahan pajak sepenuh-nya ada di KJA XYZ, sehingga mereka merasa kurang perlu teliti?	Risiko pajak bergantung pada penyebabnya, jika PT A menolak <i>advise</i> KJA XYZ, tanggung jawab beralih ke PT A, jika bersumber dari KJA XYZ, seluruh proses menjadi tanggung jawab KJA, kecuali pembayaran.	Tanggung jawab melihat dari penyebab masalah tersebut.	Pembagian tanggung jawab bergantung pada asal masalah. Jika PT A mengabaikan <i>advise</i> KJA XYZ, risiko ditanggung PT A. Namun, jika masalah timbul karena KJA XYZ tidak memberikan <i>advise</i> , tanggung jawab penuh beralih ke KJA XYZ.	Iya, karena memang peran KJA XYZ sebagai konsultan, terlebih KJA XYZ yang melakukan <i>review expense</i> .	Iya, karena hampir seluruh proses perpajakan PT B kita yang menanganinya.	KJA XYZ menanggung hampir seluruh proses perpajakan kecuali pembayaran yang merupakan tugas dari PT B sehingga bila terjadi kesalahan dalam pengenaan perpajakan dan hal lainnya kecuali pembayaran pada KJA XYZ.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
4	Peran & Strategi Kerja KJA	Strategi apa yang dilakukan KJA XYZ untuk memastikan klien memberikan data tepat waktu?	Dengan melakukan pembuatan <i>schedule</i> di akhir bulan untuk pengiriman data bulan berikutnya.	Pembuatan <i>schedule</i> setiap akhir bulannya.	Pembuatan <i>Schedule</i> setiap akhir bulannya merupakan strategi KJA XYZ untuk memastikan klien memberikan data tepat waktu.	KJA XYZ melakukan pembuatan <i>schedule</i> setiap bulannya yang dikirimkan kepada PT B.	KJA XYZ rutin mengirimkan <i>schedule</i> bulanan, namun PT B kurang fokus menyikapinya karena tidak memiliki staf khusus.	KJA XYZ rutin mengirimkan <i>schedule</i> bulanan, namun PT B kurang fokus terhadap hal tersebut.
		Bagaimana KJA XYZ memitigasi risiko jika data klien terlambat mendekati tenggat waktu?	Sejauh ini tidak pernah terlambat dalam mengirimkan data.	Karena tidak pernah terlambat data, sehingga kami tidak memiliki langkah yang ekstra.	Karena tidak pernah terlambat data, sehingga kami tidak memiliki langkah yang ekstra.	Meminta data dengan melakukan <i>carbon copy</i> (cc) email kepada direktur.	Me-lakukan <i>Follow up</i> kepada PIC PT B.	KJA XYZ melakukan <i>follow up</i> kepada PIC PT B hingga melakukan <i>carbon copy</i> email kepada direktornya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara – Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
4	Peran & Strategi Kerja KJA (Lanjut)	Sejauh mana peran KJA XYZ dalam meng-edukasi klien mengenai risiko sanksi denda pajak?	KJA XYZ selalu meng-informasikan kapan batas waktu telat pembayaran dan pelaporan pajak dan aturan yang disampaikan oleh KJA XYZ kepada PT A ini selalu yang <i>ter update</i> .	Karena kita selalu meng-edukasi PT A sehingga PT A patuh akan administrasi perpajakan-nya dan aturan yang digunakan oleh KJA tentu yang terbaru.	KJA XYZ rutin meng-informasikan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak guna mendukung kepatuhan administrasi PT A, dengan selalu menggunakan regulasi perpajakan terbaru.	Untuk menghindari klien dari sanksi pajak, KJA meng-edukasi dengan mengirimkan email rincian pajak setiap bulannya. KJA XYZ selalu memastikan kepatuhan tersebut sesuai regulasi perpajakan terbaru.	Dalam pengiriman rincian pajak PT B, KJA XYZ rutin mengingatkan batas waktu pembayaran serta risiko keter-lambatannya, dengan selalu memastikan penggunaan regulasi perpajakan terbaru.	KJA XYZ rutin melakukan edukasi bulanan melalui pengiriman email rincian pajak PT B yang memuat tenggat pembayaran, risiko sanksi keterlambatan, serta kepastian penggunaan regulasi perpajakan terbaru.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
5	Persepsi & Efektivitas	Menurut Anda, apakah sistem unifikasi ini mempermudah administratif pajak atau menambah beban kerja?	Sistem yang sudah baik terutama pada fitur <i>prepopulated</i> sehingga otomatis bukti potong sudah masuk ke <i>Coretax</i> lawan transaksi, tidak dikirim manual lagi oleh KJA XYZ, namun stabilitas dalam mengaksesnya terjadi kendala.	Sistemnya sudah baik namun terkendala karena adanya eror/ <i>bug</i> sistem disuatu keadaan.	Sistem yang diterapkan sudah baik, khususnya pada fitur <i>prepopulated</i> yang secara otomatis memasukkan bukti potong ke <i>Coretax</i> sehingga KJA XYZ tidak perlu mengirimkannya secara manual. Kendati demikian, <i>bug</i> sistem masih terjadi pada situasi tertentu.	Sistem unifikasi ini mempermudah dibanding E-SPT yang masih menerapkan jenis pajak yang terpisah.	Sistem Unifikasi sudah mempermudah administratif kami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan klien.	Sistem unifikasi sudah mempermudah administratif KJA XYZ dibanding dengan E-SPT yang masih menggunakan jenis pajak yang terpisah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
5	Persepsi & Efektivitas (Lanjutan)	Bagaimana kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan KJA XYZ dalam meminimalisir kesalahan pelaporan?	Sudah sangat puas seharusnya, dikarenakan sudah lamanya kerjasama antara KJA XYZ dengan PT A.	Seharusnya puas karena PTA sudah lama menggunakan layanan KJA XYZ dalam administrasi pajaknya.	Sudah puas karena PTA sudah lama menggunakan layanan KJA XYZ dalam administrasi pajaknya.	Puas, karena KJA XYZ tidak pernah terlambat dalam proses kerjanya.	Seharusnya puas, karena kita banyak membantu perpajakan mereka juga, banyak <i>advise</i> dari kami digunakan oleh PT B dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan.	PT B dinilai puas oleh KJA XYZ, hal ini dikarenakan KJA XYZ tidak pernah melakukan keterlambatan dalam proses kerjanya dan banyak <i>advise</i> dari KJA XYZ yang digunakan oleh PT B dalam pengambilan keputusan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6a	Per-tanyaan Tambahan PT A	Untuk pe-ngurusan SKD itu kita yang urus apa gimana?	<i>Vendor</i> yang ngurus. KJA XYZ hanya menyampaikan kepada PT A bahwa transaksi ini dikenakan PPh 26, sehingga PT A yang akan koordinasi dengan <i>vendor</i> -nya.	untuk bagian ini <i>vendor</i> yang mengurus. Namun untuk menjadikan DGT menjadi SKD itu ada di KJA XYZ yang akan menginput-nya ke <i>Coretax</i> .	<i>Vendor</i> yang ngurus. KJA XYZ hanya menyampai-kan kepada PT A bahwa transaksi ini dikenakan PPh 26, sehingga PT A yang akan koordinasi dengan <i>vendor</i> -nya. Namun untuk menjadikan DGT menjadi SKD itu ada di KJA XYZ yang akan menginput-nya ke <i>Coretax</i> .			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6a	Per-tanyaan Tambahan PT A (Lanjutan)	Jika SKD yang belum di urus oleh kita/klien apakah akan dilaporkan dengan SKD atau bagaimana kak?		Pelaporan PPh awal tanpa transaksi dengan pembayaran tarif normal 20%. Jika vendor men-gonfirmasi pengurusan SKD, PT A membayar dengan tarif <i>tax treaty</i> , lalu KJA melakukan pelaporan pembetulan setelahnya.	Pelaporan PPh awal tanpa transaksi dengan pembayaran tarif normal 20%. Jika vendor me-ngonfirmasi pengurusan SKD, PT A membayar dengan tarif <i>tax treaty</i> , lalu KJA XYZ melakukan pelaporan pembetulan setelah SKD rampung.			

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6a	Per-tanyaan Tambahan PT A (Lanjutan)	Mengapa PT A tidak melakukan <i>review expense</i> ?	Karena PT A basisnya juga sudah akrual sehingga <i>review expense</i> tidak diperlukan terlebih mereka juga sudah punya staf yang menangani pembayaran transaksi mereka.	Karena PT A ini sebenarnya sudah memiliki staf sendiri untuk masalah <i>payment</i> mereka sehingga kita tidak diminta untuk melakukan hal tersebut.	PT A sudah menggunakan basis akrual dan memiliki staf internal yang menangani pembayaran kepada <i>vendor</i> -nya sehingga KJA XYZ tidak diminta oleh PT A untuk melakukan <i>review expense</i> .			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6a	Per-tanyaan Tambahan PT A (Lanjutan)	Apakah ada perbedaan pendapat antara KJA XYZ dengan PT A terkait angka pajak atau hal lainnya. Jika iya dominan PT A menggunakan <i>advise</i> dari KJA XYZ atau bagaimana?	<i>Advise</i> dari KJA XYZ hanya saran dan masukan. PT A seringnya melakukan diskusi internal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun sejauh ini PT A memakai <i>advise</i> dari KJA XYZ.	Beda pendapat ada karena <i>advise</i> kita tidak bisa langsung diterima oleh PT A sehingga perlu dilakukan diskusi lebih <i>intens</i> .	Beda pendapat ada karena <i>advise</i> kita tidak bisa langsung diterima oleh PT A sehingga perlu dilakukan diskusi lebih <i>intens</i> .			
		Berapa orang PIC klien PT A?	PT A ini memiliki staf pajaknya sendiri.	PT A memiliki staf sendiri.	PT A memiliki staf pajaknya sendiri.			

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6a	Per-tanyaan Tambahan PT A (Lanjutan)	Apa basis yang digunakan oleh PT A? Berarti untuk pemotongan pajaknya pada saat transaksi tersebut terjadi langsung dipotong ya? Tidak dipotong pada saat pembayaran saja?	PT A ini menggunakan <i>accrual basis</i> sehingga pemotongan pajak dilakukan saat transaksi terjadi bukan saat uang keluar untuk pembayaran saja.	Iya, karena PT A ini menggunakan <i>accrual basis</i> .	PT A ini menggunakan <i>accrual basis</i> sehingga pemotongan pajak dilakukan saat transaksi terjadi bukan saat uang keluar untuk pembayaran saja.			

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6b	Pertanyaan Tambahan PT B	Berdasarkan <i>Interview</i> yang dilakukan dengan SPV PT B, beliau menyebutkan adanya proses PT B ini terdapat <i>review expense</i> , kalau dari Anda kendala dalam <i>review expense</i> itu seperti apa?				Kendalanya ada di kurangnya dokumen dan penjelasan rincian atas dokumen tersebut, terlebih jika <i>grossup</i> .	Kendalanya ada di kurangnya dokumen dan penjelasan rincian atas dokumen tersebut, terlebih jika <i>grossup</i> .	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

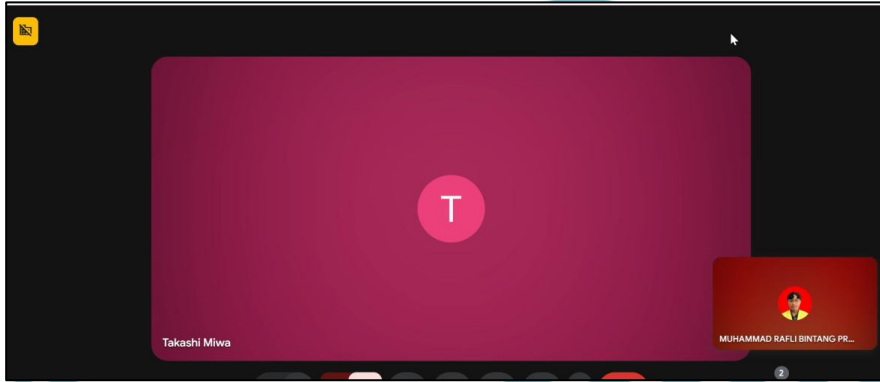
No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Jawaban PIC PT A		Kesimpulan	Jawaban PIC PT B		Kesimpulan
			SPV 25/04/2026	Senior 30/04/2026		SPV 15/04/2026	Senior 22/04/2026	
6b	Pertanyaan Tambahan PT B (Lanjutan)	Berarti kalau <i>grossup</i> akan ada revisi <i>invoice</i> , apakah PT B akan mengikuti <i>advise</i> dari KJA XYZ?				Sejauh ini mengikuti, namun perlu dicatat bahwa <i>grossup</i> juga beberapa tidak perlu melakukan revisi <i>invoice</i> apabila transaksi tersebut <i>reimburse-ment</i> .	Sejauh ini mengikuti, namun perlu dicatat bahwa <i>grossup</i> juga beberapa tidak perlu melakukan revisi <i>invoice</i> apabila transaksi tersebut <i>reimburse-ment</i> .	

Sumber: Data diolah (2026)

Lampiran 3 Transkrip dan Dokumentasi Wawancara - Sambungan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Wawancara Bersama SPV PT A



Wawancara Bersama Senior PT A



Wawancara Bersama SPV PT B



Wawancara Bersama Senior PT B



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 SPT Masa Unifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik PT A

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK
Desember 2025

STATUS SPT
NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : 00:
A.2 NAMA : PT
A.3 ALAMAT : GE
KU
A.4 NO. TELEPON : 08:

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0	222.015	0	222.015	0	0
	KJS : 411128-100	0			0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	222.015		222.015	0	0
2	PPH Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPH Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0			0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPH Pasal 23	0	6.387.983	0	6.387.983	0	0
	KJS : 411124-100	0	6.387.983		6.387.983	0	0
5	PPH Pasal 26	0	7.000.356	0	7.000.356	0	0
	KJS : 411127-110	0	7.000.356		7.000.356	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	13.610.354	0	13.610.354	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak
C.2 NAMA : MITS
C.3 TANGGAL : 19 Januari 2026
C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

C.5 QR Code :

Ditandatangani secara elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 □ informasi@pajak.go.id □ pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE
Tanggal

: BPE-13242/CT/KPP.0412/2026
: 19 Januari 2026

NPWP
Nama Wajib Pajak
Jenis SPT
Tahun Pajak
Masa Pajak
Status SPT
Saluran
Tanggal Terima SPT

: 00:
: SB
: SPT Masa PPh Unifikasi
: 2025
: Desember 2025
: Normal
: Portal Wajib Pajak
: 19 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 SPT Masa Unifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik PT B

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK
Desember 2025

STATUS SPT
NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : 1001

A.2 NAMA : MITI

A.3 ALAMAT : MEH
TEB

A.4 NO. TELEPON : 0811

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0	1.258.650	0	1.258.650	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	1.258.650		1.258.650	0	0
2	PPH Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPH Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPH Pasal 23	0	589.632	0	589.632	0	0
	KJS : 411124-100	0	589.632		589.632	0	0
5	PPH Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	1.848.282	0	1.848.282	0	0

C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak

C.2 NAMA : SHL

C.3 TANGGAL : 20 Januari 2026

C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya kentahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

C.5 QR Code :

Ditandatangani secara elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 | informasi@pajak.go.id | pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-10849/CT/KPP.0403/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

NPWP : 100

Nama Wajib Pajak : MIT

Jenis SPT : SPT Masa PPh Unifikasi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 20 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Rafli Bintang Pratama
2. NIM : 2204431004
3. Program Studi : Akuntansi Keuangan
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi :
"Analisis Kepatuhan Perpajakan Unifikasi PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2
Pada Klien KJA XYZ"
5. Dosen Pembimbing : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1	3 Februari 2026	Pengarahan Penulisan Skripsi Penjelasan mengenai penentuan masalah dan sistematika penulisan skripsi	
2	14 Februari 2026	Bimbingan Bab 1 Latar belakang sampai dengan manfaat penelitian	
3	23 Februari 2026	Bimbingan Bab 2 Landasan teori sampai dengan kerangka penelitian	
4	3 Maret 2026	Bimbingan Bab 3 & Finalisasi Proposal Penelitian	
5	31 Maret 2026	Bimbingan Revisi atas Seminar Proposal	
6	14 April 2026	Bimbingan Bab 4 & Finalisasi Form Wawancara	
7	28 April 2026	Bimbingan Bab 4 Hasil & pembahasan	
8	11 Mei 2026	Bimbingan Bab 5 Kesimpulan & saran	
9	19 Mei 2026	Finalisasi Skripsi	

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan

Depok, 19/5/2026

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA.

NIP. 196901111998022001